

Analisis Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2009-2023

Lisyah Afnilita, Yulmardi, Jaya Kusuma Edy

Program Studi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

Co-author: lisyahafnilita@gmail.com**Abstract**

This study, entitled Analysis of the Expenditure Performance of the Jambi City Government for Fiscal Years 2009-2023, aims to analyze the allocation of regional expenditures based on the classification set by the Jambi City Government, assess expenditure performance through variance, growth, harmony ratio, and efficiency, and examine factors influencing the Audit Board of Indonesia's (BPK) opinion on the local government's financial statements. Secondary data were obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Jambi City and BPK of Jambi Province. The data were analyzed using descriptive and quantitative methods with multiple linear regression through EViews12. The results show that personnel expenditures dominated operational spending (61.64% on average). The largest capital expenditure was allocated to roads, irrigation, and networks, while the highest unexpected spending related to COVID-19 response. Expenditure variance was favorable, efficiency ranged from moderate to low, and internal control weaknesses affected BPK's audit opinion.

Keywords: Regional Expenditure, Capital Expenditure, Audit Opinion, Financial Statements

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2009-2023, bertujuan untuk menganalisis alokasi belanja daerah berdasarkan klasifikasi Pemerintah Kota Jambi, menilai kinerja belanja melalui varians, pertumbuhan, rasio keserasian, dan efisiensi, serta mengkaji faktor yang memengaruhi opini BPK atas laporan keuangan daerah. Data sekunder periode 2009-2023 diperoleh dari Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Provinsi Jambi, dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif menggunakan regresi linier berganda dengan EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan belanja pegawai mendominasi belanja operasional dengan rata-rata 61,64%. Belanja modal terbesar dialokasikan untuk jalan, irigasi, dan jaringan, sedangkan belanja tak terduga tertinggi terkait penanganan Covid-19. Varians belanja tergolong *favourable*, rasio keserasian menunjukkan proporsi belanja pegawai 30-60%, belanja modal 10-20%, dan operasional 70-80%. Efisiensi belanja tergolong cukup hingga kurang efisien, sementara kelemahan pengendalian internal berpengaruh terhadap opini BPK.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Belanja Modal, Opini Audit, Laporan Keuangan

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

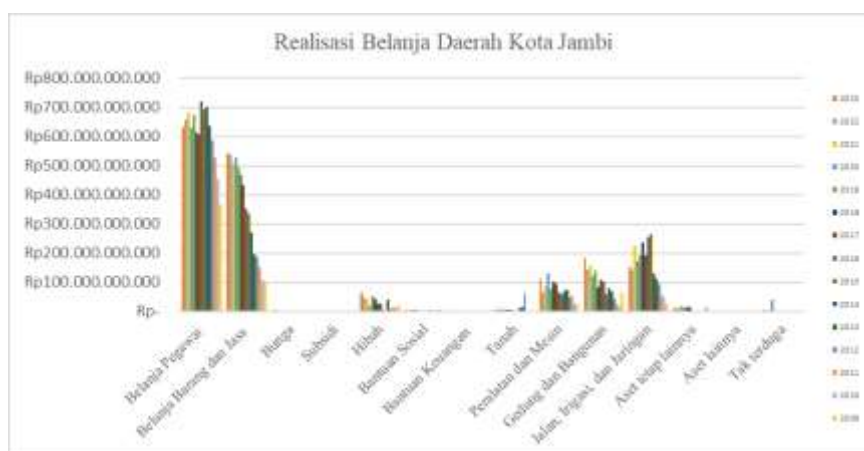
Indonesia, memiliki sebanyak 16.056 pulau yang telah memiliki koordinat dan terdaftar secara resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, masing-masing pulau tersebut tersebar

diberbagai kepulauan yang menjadikan Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 1.829.410 km². Keberagaman letak geografis ini menyebabkan setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik geografis yang berbeda-beda, yang tentunya kondisi geografis antar wilayah di Indonesia tersebut menyebabkan setiap daerah memiliki kebutuhan yang beragam pula.

Hal tersebut menjadikan otonomi daerah menjadi sebuah jawaban, hal ini dikarenakan otonomi daerah memberikan sebuah kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengatur urusannya sendiri yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan wilayahnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Terdapat sebuah penelitian yang mendukung pandangan ini, seperti riset yang dilaksanakan oleh Prabowo & Rafli (2020) yang menyatakan bahwa otonomi daerah berperan sebagai satu di antara instrumen yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Menurut Amin (2019), karakteristik utama yang menunjukkan kemampuan suatu daerah otonom dalam menjalankan perannya, terlihat dari kemampuan keuangan daerah nya. Hal ini menandakan bahwasanya daerah otonom perlu mempunyai wewenang serta kapasitas guna mengoptimalkan sumber keuangan secara mandiri, juga mengatur serta memanfaatkan keuangan tersebut secara efektif untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan melalui kegiatan belanja daerah yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah dan sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat.

Tujuan dilaksanakannya belanja daerah juga sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan bagi masyarakat, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya (Elsye 2020). Kegiatan belanja daerah tentunya dilakukan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, tak terkecuali Pemerintah Daerah Kota Jambi, dalam pelaksanaan belanja daerah, perlu dilakukannya sebuah penilaian kinerja, hal ini dikarenakan hasil penilaian kinerja belanja daerah dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu pemerintahan dalam memanfaatkan keuangan daerah untuk mendanai berbagai aktivitas pelayanan publik dan pembangunan di wilayah tersebut (Ariadi 2021).



Gambar 1. Realisasi Belanja Daerah

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Jambi

Berdasarkan pada grafik diatas, dapat diketahui bahwa belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi memiliki proporsi belanja operasional khususnya belanja pegawai yang lebih besar dibanding alokasi pada belanja modal, padahal menurut Halim (2016),

kinerja pemerintah dicerminkan dari bagaimana anggaran keuangannya disusun. Sehingga harapannya, alokasi yang dilakukan pemerintah pada belanja modal yang merupakan sebuah belanja yang berkaitan langsung dengan fungsi pelayanan publik, harus mendapatkan porsi yang relatif besar.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan, termasuk belanja yang telah dilakukan, pemerintah daerah diwajibkan menyusun sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang dimana LKPD daerah berfungsi sebagai alat untuk membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan daerah, mengevaluasi efektivitas serta efisiensi kinerja pemerintah daerah, dan menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suwanda dkk 2020). LKPD yang dibuat oleh Pemerintah daerah tentunya akan melalui tahapan audit yang dilaksanakan oleh lembaga audit negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang Sepanjang tahun 2009 sampai dengan 2023, hasil temuan yang didapat oleh BPK berjumlah 175 temuan dengan perkembangan opini sebagai berikut:

TAHUN	JENIS OPINI
2009	Wajar Dengan Pengecualian
2010	Wajar Dengan Pengecualian
2011	Wajar Dengan Pengecualian
2012	Wajar Dengan Pengecualian
2013	Wajar Dengan Pengecualian
2014	Wajar Dengan Pengecualian
2015	Tidak Memberikan Pendapat
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian
2023	Wajar Tanpa Pengecualian

Tabel 1 Jenis Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Kota Jambi 2009-2023

Sumber : BPK Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari tahun 2009-2014 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, sedangkan ditahun 2015 Pemerintah Kota Jambi mendapatkan opini tidak memberikan pendapat dari BPK, namun di tahun 2016-2023 opini yang di dapat kunjung membaik menjadi wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan hal tersebut, timbul dugaan mengenai bagaimana opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD dapat berubah dari tahun ke tahun, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan tersebut. Meskipun opini BPK atas LKPD Pemerintah Kota Jambi telah menunjukkan tren yang baik, khususnya dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2016, namun opini tersebut tidak mencerminkan efisiensi dan efektivitas kinerja pengelolaan anggaran dan belanja daerah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana kinerja belanja daerah, karena opini BPK lebih berfokus pada aspek kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan pada pencapaian hasil atau *output* dari anggaran yang telah direalisasikan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang diimplementasikan pada penelitian ini ialah Deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang di dapat dari

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi berupa Laporan Realisasi Anggaran, dan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk untuk menganalisis kinerja belanja daerah, penulis menggunakan rumus analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis rasio keseasian, dan rasio efisiensi (Kawatu 2019), dengan formulasi perhitungan nya terdiri atas : Analisis varians = Realisasi Belanja - Anggaran Belanja, yang dimana terdapat dua jenis selisih yaitu selisih yang disukai jika realisasi belanja lebih kecil dari pada anggaran nya, dan selisih yang tidak disukai terjadi ketika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya, selanjutnya analisis pertumbuhan belanja = Data setelah tahun dasar - data pada tahun dasar / data pada tahun dasar X 100%, yang dimana jika persentase kecil dari 30% maka masuk ke dalam kriteria tidak berhasil, 30%-55% kurang berhasil, 55%-70% cukup berhasil, 70%-85% berhasil, hingga 85%-100% berhasil.

Pada analisis rasio keserasian, untuk analisis keserasian belanja pegawai, dapat menggunakan perhitungan dengan melakukan pembagian antara belanja pegawai/total belanja daerah X 100%, sedangkan untuk belanja modal menggunakan perhitungan total belanja modal/total belanja daerah X 100%, serta dalam menganalisis rasio belanja operasional dapat menggunakan perhitungan berupa total belanja operasional/total belanja daerah X 100%. Selanjutnya pada analisis rasio efisiensi dapat menggunakan rumus sebagai berikut, realisasi belanja daerah/anggaran belanja daerah X 100%. Berdasarkan Abdul Halim (2007) dalam Ariadi (2021), terdapat beberapa kriteria efisiensi, yang dimana jika hasil mencapai 100% maka hal tersebut masuk ke dalam kriteria tidak efisien, jika 90-100 maka kurang efisien, 80-90 cukup efisien, 60-80 efisien, dan dibawah dari 60 dikategorikan sangat efisien.

Sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi opini BPK terhadap LKPD, penulis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya (positif atau negatif), seberapa besar pengaruhnya, dan untuk memprediksi nilai variabel dependen dengan menggunakan variabel independen (Priyatno, 2020), dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

Y : Opini Audit

α : Konstanta

β_1 : Koefisien Variabel SPI

β_2 : Koefisien Variabel Ketidapatuhan

X_1 : Sistem Pengendalian Internal (SPI)

X_2 : Ketidapatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan

e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Analisis besaran alokasi belanja daerah berdasarkan klasifikasinya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2009-2023

Gambar 2. Realisasi Belanja Operasional Pemerintah Kota Jambi



Sumber : BPKAD Kota Jambi (diolah)

Tabel 2. Realisasi Belanja Operasional

Tahun Belanja	Jenis Belanja Operasional (Rp)							Jumlah Belanja Operasional
	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Bunga	Subsidi	Hibah	Bantuan Sosial	Bantuan Keuangan	
2023	633.646.621.081	542.691.984.444	962.846.340	1.113.369.872	66.177.659.650	5.662.232.790	-	1.250.254.714.177
2022	657.648.319.580	535.487.916.812	5.866.774.340	614.964.000	47.357.346.311	3.934.494.800	-	1.250.909.815.843
2021	682.947.098.349	503.686.765.887	1.626.646.569	197.820.000	43.843.156.233	6.640.634.682	-	1.238.942.121.720
2020	628.395.170.421	528.364.153.071	-	-	18.105.901.031	5.671.400.000	-	1.180.536.624.523
2019	674.565.129.247	493.555.305.468	-	-	53.035.792.870	5.801.400.000	-	1.226.757.627.585
2018	614.857.168.444	467.426.271.025	-	-	44.698.302.282	3.915.540.000	-	1.130.897.273.751
2017	609.075.861.181	433.829.756.112	-	-	27.987.501.839	-	-	1.070.893.119.132
2016	721.853.145.334	350.592.467.899	-	-	26.133.087.504	1.557.150.000	-	1.100.135.850.737
2015	692.753.841.828	337.904.321.856	-	-	5.627.038.649	3.645.000.000	-	1.039.930.202.333
2014	700.681.837.879	271.629.484.774	-	-	3.791.283.500	4.282.750.000	-	980.385.356.153
2013	634.582.690.013	196.981.332.594	-	-	41.322.686.558	2.436.830.000	-	875.323.539.165
2012	587.711.368.761	185.776.909.202	-	-	8.202.223.300	-	835.652.829	782.526.154.092
2011	527.532.749.422	153.006.667.120	-	-	15.201.930.654	4.680.747.829	-	700.422.895.025
2010	454.817.058.180	110.112.479.186	140.504	-	10.663.181.703	4.468.174.829	-	580.061.034.402
2009	366.168.244.122	101.455.131.063	352.888.566	923.715.000	21.762.990.996	2.978.715.433	1.924.000.000	495.565.685.180
Jumlah Periode Belanja	9.187.236.295.842	5.712.300.946.513	8.809.296.319	2.049.868.872	433.910.083.080	55.675.070.363	2.759.652.829	14.903.541.213.888

Sumber : BPKAD Kota Jambi (diolah)

Sepanjang 2009-2023, total belanja operasional Pemerintah Kota Jambi mencapai Rp14,90 triliun, dengan belanja pegawai mendominasi sebesar Rp9,19 triliun (61,64%), sedangkan belanja bantuan keuangan menjadi yang terkecil, hanya Rp2,76 miliar (0,018%). Struktur belanja menunjukkan dominasi belanja pegawai, menandakan tingginya beban rutin APBD. Pada 2012-2023, komponen terbesar berasal dari gaji dan tunjangan (Rp5,08 triliun) dan terkecil dari biaya pemungutan PBB (Rp1,15 miliar). Total realisasi mencapai Rp7,83 triliun, menggambarkan porsi besar APBD untuk aparatur. Tahun 2009-2011, Dinas Pendidikan mencatat belanja tertinggi (Rp799,47 miliar), disusul Dinas Kesehatan (Rp108,34 miliar), sedangkan Bagian Humas dan Informasi terendah (Rp158,44 juta), menunjukkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar.

Pos belanja barang dan jasa mencapai Rp3,07 triliun (2018-2023), dengan komponen jasa terbesar (Rp1,71 triliun) dan pengeluaran pihak ketiga terkecil (Rp20,12 miliar). Pada 2012-2017, jasa tenaga perorangan menjadi terbesar (Rp340,90 miliar; 19,18%), sedangkan sewa alat berat terkecil (Rp114,5 juta). Tahun 2009-2011, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mencatat tertinggi (Rp63,56 miliar; 17,43%), menandakan fokus pada kebersihan dan infrastruktur lingkungan, sedangkan Bagian Organisasi terendah (0,10%).

Belanja bunga mencapai Rp8,81 miliar, terdiri dari pembayaran utang kepada PT SMI Rp8,46 miliar dan Pemerintah Pusat Rp352,89 juta. Meskipun kecil, ini menandakan adanya risiko ketergantungan fiskal jangka panjang. Belanja subsidi selama 2009-2023 berupa pasar murah Rp926,15 juta dan beras untuk masyarakat miskin Rp923,71 juta. Pada belanja hibah, arah kebijakan bergeser antarperiode, yang dimana pada 2018-2023, realisasi terbesar ialah hibah kepada badan/lembaga berbadan hukum Rp106,08 miliar (38,74%), terkecil kepada

kelompok masyarakat Rp1,86 miliar (0,68%), di tahun 2012-2017, lebih dominan pada hibah barang/jasa Rp24,22 miliar (21,42%), dan terkecil merupakan kepada BKMT Rp25 juta (0,022%), sedangkan 2009-2011, realisasi terbesar ialah untuk pendidikan Rp17,18 miliar (36,07%) dan terkecil merupakan untuk pembinaan Utsawa Dharma Gita Hindu Rp30 juta (0,06%).

Belanja sosial didominasi bantuan uang kepada individu Rp12,57 miliar (21,24%), sedangkan terkecil bantuan barang untuk keluarga miskin Rp21,53 juta (0,03%). Belanja bantuan keuangan hanya muncul pada 2009 (Rp2,16 miliar) dan 2012 (Rp835,65 juta), terutama untuk partai politik. Secara keseluruhan, struktur belanja operasional Pemerintah Kota Jambi selama 2009-2023 memperlihatkan dominasi belanja rutin dibanding belanja pembangunan, terutama pada komponen gaji, tunjangan, serta jasa operasional. Selanjutnya berikut mengenai besaran belanja modal yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi sepanjang periode 2009-2023:

Gambar 1.3 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi



Sumber: BPKAD Kota Jambi (diolah)

Tabel 3. Realisasi Belanja Modal

Jenis Belanja	Jenis Belanja Modal (Rp)						Jumlah Belanja Per-Tahun
	Belanja Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset tetap lainnya	Aset lainnya	
2023	6.320.000.000	110.429.401.429	184.015.001.376	151.582.027.590	13.049.752.793	-	465.396.183.188
2022	7.565.000.000	64.474.137.348	143.907.007.228	140.522.841.590	12.160.097.082	-	368.629.083.248
2021	9.426.780.000	87.421.234.280	159.133.484.115	226.986.232.364	12.838.061.250	-	495.805.792.009
2020	6.880.000.000	130.165.836.495	120.545.997.615	169.600.168.912	16.878.760.161	281.115.000	444.351.878.183
2019	8.449.500.000	76.218.787.821	139.985.318.995	194.287.434.187	12.294.240.885	864.722.038	432.100.003.926
2018	4.854.785.000	102.157.552.470	84.293.967.095	237.735.932.399	14.999.389.312	1.767.535.773	445.809.162.049
2017	5.453.460.000	93.631.920.875	109.570.626.675	193.956.072.615	16.049.169.803	655.346.000	419.316.595.968
2016	157.603.000	64.659.781.552	102.411.390.734	255.842.337.120	723.678.484	401.164.000	424.195.954.890
2015	2.381.288.000	57.946.008.408	60.129.512.749	263.995.105.600	326.536.230	350.293.000	385.128.743.987
2014	13.191.485.489	70.362.971.146	80.371.607.072	130.966.436.760	934.685.728	269.519.000	296.096.705.195
2013	16.228.731.400	74.579.395.443	66.747.377.110	113.259.399.150	1.906.626.275	496.965.000	273.218.494.378
2012	62.131.637.833	49.003.946.110	44.108.471.043	91.712.421.806	1.069.531.300	410.659.000	248.436.667.092
2011	1.659.313.850	55.835.142.405	23.961.201.842	55.263.952.720	13.993.958.253	149.190.000	150.862.759.070
2010	-	28.240.042.134	14.880.375.267	45.466.747.730	256.914.500	46.850.000	88.890.929.631
2009	-	23.430.977.226	63.690.205.689	25.042.693.097	2.688.612.350	134.630.000	114.987.118.362
Jumlah Per-Pos Belanja	144.699.584.572	1.088.557.135.142	1.397.751.544.605	2.296.219.803.640	120.170.014.406	5.827.988.811	5.053.226.071.176

Sumber : BPKAD Kota Jambi (diolah)

Berdasarkan grafik dan data belanja modal, realisasi belanja modal Pemerintah Kota Jambi periode 2009-2023 mencapai Rp5.053.226.071.176. Pengeluaran terbesar berasal dari belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp2.296.219.803.640 (45,44%), sedangkan terkecil adalah belanja aset lainnya senilai Rp5.827.988.811 (0,11%). Belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp1.088,56 miliar, dengan pengeluaran terbesar untuk alat kedokteran senilai Rp275,21 miliar (28,05%), dan terkecil untuk alat industri kecil-menengah sebesar Rp3,50 juta (0,0003%). Pada 2009-2011, totalnya Rp107,51 miliar, dengan RSUD sebagai SKPD terbesar (Rp30,41 miliar; 28,28%) dan Bagian Humas terkecil (Rp8,67 juta; 0,008%).

Belanja tanah periode 2012-2023 mencapai Rp138,13 miliar, didominasi pengeluaran untuk pos tanah sebesar Rp91,55 miliar (66,27%), sedangkan terkecil tanah untuk bangunan bukan gedung sebesar Rp0,80 miliar (0,57%). Pada 2009-2011, realisasi hanya terjadi pada

2011, yakni Rp1,66 miliar oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Belanja gedung dan bangunan periode 2012-2023 mencapai Rp1.295,22 miliar, dengan pengeluaran terbesar untuk gedung tempat kerja (Rp1.085,67 miliar; 83,82%) dan terkecil konstruksi jaringan air (Rp0,04 juta). Pada 2009-2011, totalnya Rp102,53 miliar, didominasi Dinas Pekerjaan Umum (Rp30,67 miliar; 29,91%) dan terkecil Badan Kelautan, Perikanan, dan Penyuluhan (Rp0,02 miliar; 0,019%).

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan pada 2012-2023 mencapai Rp2.169,21 miliar, dengan belanja jalan terbesar (Rp1.529,43 miliar; 70,50%) dan instalasi lain terkecil (Rp0,07 miliar; 0,003%). Pada 2009-2011, totalnya Rp125,77 miliar, didominasi Dinas PU (Rp112,86 miliar; 89,73%) dan terkecil Satpol PP (Rp0,001 miliar; 0,0008%). Belanja aset tetap lainnya periode 2012-2023 mencapai Rp103,07 miliar, terbesar untuk buku (Rp41,77 miliar; 40,52%) dan terkecil musik (Rp0,04 miliar; 0,04%). Pada 2009-2011, totalnya Rp16,94 miliar, dengan Dinas Pendidikan sebagai tertinggi (Rp14,94 miliar; 88,20%) dan Dinas Pendapatan Daerah terendah (Rp0,00012 miliar).

Belanja aset lainnya 2012-2023 sebesar Rp5,50 miliar, terdiri dari aset tidak berwujud (Rp5,49 miliar) dan pengadaan kamera (Rp0,005 miliar). Pada 2009-2011, totalnya Rp0,33 miliar, terbesar oleh Sekretariat Daerah (Rp0,13 miliar; 40,71%) dan terkecil oleh Dinas PU (Rp0,002 miliar; 0,60%). Secara keseluruhan, struktur belanja modal Pemerintah Kota Jambi selama 2009-2023 memperlihatkan arah kebijakan yang konsisten pada pembangunan infrastruktur dasar, dengan porsi terbesar pada sektor jalan, irigasi, dan jaringan serta gedung dan bangunan. Meskipun kebijakan tersebut memperkuat fondasi fisik daerah, namun investasi pada aset nonfisik dan teknologi belum menjadi fokus utama, yang menyebabkan peluang peningkatan efisiensi pelayanan publik melalui inovasi dan digitalisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Selanjutnya ialah realisasi belanja tak terduga yang sepanjang periode tersebut tentunya memiliki jenis belanja yang tidak akan sama, sepanjang tahun 2009-2023 memiliki besaran realisasi sebesar Rp62.933.674.735 dengan belanja bantuan terhadap kegiatan *COVID-19* yang memiliki pengeluaran terbesar sebesar Rp43.691.680.353 atau senilai 69,42% dari total keseluruhan belanja sedangkan pengeluaran terkecil adalah belanja terkait restitusi STTS sebesar Rp1.200.000 atau senilai 0,0019%.

2) Analisis Kinerja Belanja Daerah

Tabel 4 Analisis varians

Tahun	Anggaran (1)	Realisasi (2)	Selisih (2-1)
2023	1.863.794.648.856,00	1.720.255.456.671,30	- 143.539.192.184,70
2022	1.812.832.658.629,00	1.622.747.432.178,57	- 190.085.226.450,43
2021	1.961.694.919.058,00	1.740.357.878.019,78	- 221.337.041.038,22
2020	1.826.930.849.781,00	1.665.932.584.837,45	- 160.998.264.943,55
2019	1.847.519.084.475,00	1.660.527.631.709,83	- 186.991.452.765,17
2018	1.753.859.500.067,00	1.577.311.832.700,20	- 176.547.667.366,80
2017	1.669.868.418.542,00	1.495.010.546.734,80	- 174.857.871.807,20
2016	1.706.345.622.920,00	1.525.413.835.576,45	- 180.931.787.343,55
2015	1.603.976.583.643,00	1.425.607.446.320,80	- 178.369.137.322,20
2014	1.413.931.124.461,00	1.276.975.539.348,50	- 136.955.585.112,50
2013	1.296.979.962.373,82	1.149.030.602.043,00	- 147.949.360.330,82
2012	1.047.100.061.276,00	1.031.313.340.884,89	- 15.786.720.391,11
2011	903.379.629.448,00	852.846.534.124,91	- 50.533.095.323,09
2010	731.617.277.957,00	669.435.527.164,92	- 62.181.750.792,08
2009	667.673.782.210,32	612.698.560.543,78	- 54.975.221.666,54

Sumber: BPKAD Kota Jambi (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa pada sepanjang periode 2009-2023 hasil analisis menunjukkan hasil analisis yang selalu bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa

belanja daerah yang dilakukan pada periode tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya, dan menjadikan hasil selisih varians masuk kedalam kategori selisih yang disukai (*favourable variance*)

3) Analisis Pertumbuhan Belanja

Grafik pertumbuhan belanja daerah



Sumber : BPKAD Kota Jambi (diolah)

Berdasarkan data grafik, pertumbuhan belanja daerah Kota Jambi tahun 2009-2023 menunjukkan pola fluktuatif. Pada 2010, pertumbuhan mencapai 27,39%, lebih tinggi dari 2009 yang sebesar 9,26%, namun kemudian turun menjadi 20,92% dan terus menurun tiap tahun. Periode 2012-2015 menunjukkan perlambatan dengan kisaran stabil 7-11%, menandakan upaya konsolidasi fiskal agar belanja sejalan dengan pendapatan daerah. Tahun 2016 pertumbuhan turun menjadi -1,99%, lalu naik lagi menjadi 5,50% pada 2017. Kondisi minus juga terjadi pada 2021 sebesar -6,75%, sebelum meningkat kembali 6% pada 2022. Secara keseluruhan, merujuk pada Ariadi (2021), laju pertumbuhan belanja 2009-2023 tergolong tidak berhasil, karena persentasenya belum mencapai ambang batas kategori cukup berhasil, berhasil, maupun sangat berhasil.

4) Analisis rasio keserasian

A. Rasio Belanja Pegawai

Grafik Rasio Belanja Pegawai

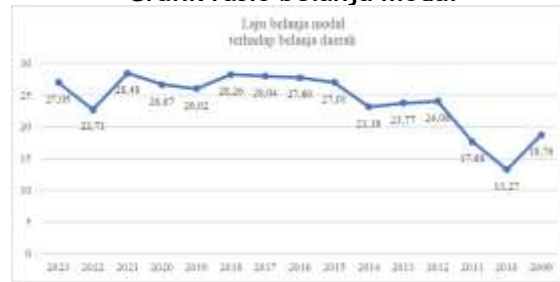


Sumber : BPKAD Kota Jambi (diolah)

Berdasarkan data grafik, laju porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah tahun 2009-2023 cenderung stabil pada kisaran 30-60%. Pada 2009, porsinya sebesar 59,76% dan naik menjadi 67,94% pada 2010. Namun, sejak 2011 hingga 2018 terjadi penurunan dari 61,85% menjadi 38,98%. Pada periode 2019-2023, persentasenya berfluktuasi dari 40,62% (2019), 37,72%, 39,24%, 40,52%, hingga mencapai 36,83% pada 2023.

B. Rasio Belanja Modal

Grafik rasio belanja modal



Sumber : BPKAD Kota Jambi (diolah)

Berdasarkan pada grafik laju porsi belanja modal terhadap belanja daerah sepanjang tahun 2009-2023, dapat disimpulkan bahwa besaran persentase belanja modal terhadap belanja daerah cenderung cukup stabil sepanjang periode tersebut, porsi belanja berada dikisaran persentase 13%-20% yang dimana di tahun 2009 persentase belanja modal sebesar 18,76% dan di tahun 2023 sebesar 27,05%. Persentase terendah berada di tahun 2010 senilai 13,27% dan persentase tertinggi berada di tahun 2021 sebesar 28,48%.

C. Rasio belanja operasional

Grafik rasio belanja operasional



Sumber : BPKAD Kota Jambi (diolah)

Berdasarkan grafik laju belanja operasional terhadap belanja daerah periode 2009-2023, kontribusi belanja operasional tergolong besar, yakni sekitar 70-80%, namun cenderung menurun dari 80,88% pada 2009 menjadi 72,67% pada 2023. Kontribusi tertinggi tercatat pada 2010 sebesar 86,64%, sedangkan terendah pada 2020 sebesar 70,86%. Selain itu, sepanjang periode tersebut, persentase belanja operasional jauh lebih besar dibanding belanja modal yang hanya berkisar 13-20%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah Kota Jambi lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan rutin dan operasional pemerintahan dibanding pembangunan infrastruktur dan pembentukan aset tetap.

Dominasi belanja operasional yang tinggi tersebut berpotensi menurunkan ruang fiskal untuk belanja pembangunan jangka panjang, sehingga penting untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan tersebut benar-benar memberikan output dan manfaat optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, setelah mengetahui proporsi belanja berdasarkan jenisnya, langkah selanjutnya adalah menganalisis tingkat efisiensi belanja daerah, guna menilai apakah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah telah sepadan dengan hasil atau kinerja yang dicapai

5) Analisis Efisiensi

Tahun	Efisiensi Belanja Daerah (%)
2023	92,29
2022	89,51
2021	88,71
2020	91,18
2019	89,87
2018	89,93
2017	89,52
2016	89,39
2015	88,87
2014	90,31
2013	88,59
2012	98,49
2011	94,40
2010	91,50
2009	91,76

Sumber : BPKAD Kota Jambi (diolah)

Berdasarkan pada data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi belanja daerah Pemerintah Kota Jambi selalu berada pada hasil yang kurang efisien dan cukup efisien dengan tahun 2009-2012 masuk kedalam kategori kurang efisien, sedangkan ditahun 2013 masuk kedalam kategori cukup efisien, namun di tahun 2014 kembali masuk kedalam kategori kurang efisien. Sepanjang tahun 2015-2019 belanja yang dilakukan masuk keadalam kategori cukup efisien, namun kembali lagi menjadi kurang efisien di tahun 2020. Di tahun 2021-2022 mendapatkan kriteria cukup efisien sedangkan di tahun 2023 kembali masuk keadalam kategori kurang efisien.

6) Analisis persamaan regresi linear berganda.

$$Y = 3.9600761881 - 0.126928120902 * X_1 + 0.0457128583026 * X_2 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 3.960 maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan rerata, maka variabel dependen akan turut meningkat sebesar 3.960
2. Nilai koefisien regrei variabel X_1 bernilai negatif (-) sebesar -0.126, maka dapat diartikan bahwa jika variabel X_1 meningkat maka variabel y akan menurun sebesar -0.126, begitu juga sebaliknya
3. Nilai koefisien regresi variabel X_2 bernilai positif sebesar 0.045, maka dapat diartikan bahwa jika variabel X_2 meningkat maka varibel y juga turut meningkat sebesar 0.045, begitu juga sebaliknya.

7) Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.960076	0.451605	8.768885	0.0000
X1	-0.126928	0.056290	-2.254878	0.0436
X2	0.045713	0.074640	0.612441	0.5517
R-squared	0.303035	Mean dependent var		3.400000
Adjusted R-squared	0.186874	S.D. dependent var		0.828079
S.E. of regression	0.746707	Akaike info criterion		2.430570
Sum squared resid	6.690864	Schwarz criterion		2.572180
Log likelihood	-15.22927	Hannan-Quinn criter.		2.429061
F-statistic	2.608754	Durbin-Watson stat		2.226912
Prob(F-statistic)	0.114621			

Sumber : Hasil Olah Data EvIEWS 12 (2025)

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Variabel X_1 memiliki nilai t-statistic sebesar -2.25 dengan nilai prob. Signifikansi sebesar 0.0436 yang dimana hasil tersebut kecil dari 0,05 (<0,05) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X_1 berpengaruh terhadap variabel y. maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

b. Variabel X2 memiliki nilai t-statistic sebesar 0,61 dengan nilai prob. Signifikansi sebesar 0,5517 yang dimana hasil tersebut besar dari 0,05 ($>0,05$) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel y. maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh N. I. Nasution dkk (2023) yang juga menghasilkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap opini audit, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit.

Uji Simlutan (Uji f)

F-statistic	2.608754
Prob(F-statistic)	0.114621

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 12 (2025)

Berdasarkan gambar diatas, diketahui nilai f statistic sebesar 2.608 dengan nilai prob f statistic sebesar 0.114 (>0.05) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen (x) tidak berpengaruh secara simultan (bersamaan) terhadap variabel dependen (y).

Uji koefisien determinasi

R-squared	0.303035
Adjusted R-squared	0.186874

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 12 (2025)

Berdasarkan gambar diatas, diketahui nilai adjust r square sebesar 0.186 maka disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 18,6%, sedangkan sisanya sebesar 81,4% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2009-2023, belanja pegawai menjadi komponen dominan dalam belanja operasional Pemerintah Kota Jambi dengan rata-rata 61,64% dari total belanja. Pada belanja modal, alokasi terbesar ditujukan untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan, sedangkan belanja tak terduga tertinggi tercatat pada pengeluaran bantuan kegiatan Covid-19.

Analisis varians menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah berada dalam kategori *favourable variance*, karena realisasi belanja lebih rendah dibandingkan anggarannya. Pertumbuhan belanja daerah cenderung tidak stabil, terutama pada tahun 2016 dan 2021 yang mengalami pertumbuhan negatif. Rasio keserasian belanja menunjukkan kestabilan pada rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah (30-60%), belanja modal (10-20%), dan belanja operasional (70-80%). Hasil analisis efisiensi mengindikasikan bahwa kinerja belanja daerah berada pada kategori cukup efisien hingga kurang efisien.

Selanjutnya, faktor kelemahan sistem pengendalian internal terbukti berpengaruh terhadap opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sedangkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam perspektif teoritis, normatif,*

dan empiris. UB Press.

- Ariadi, W. (2021). *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep dan Analisis* (T. Yuliyanti, Ed.). DeePublish.
- Elsye, R. (2020). *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*. ALQAPRINT JATINANGOR.
- Fariah, A., & Nendi, I. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Cirebon Jawa Barat. *Equivalent Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi*, 2(2), 59-69. <https://doi.org/10.46799/jequi.v2i2.1>
- Fathiyah, F., Sukmana, A., & Majid, H. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 117. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.236>
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Kawatu, S. F. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. DEEPUBLISH.
- Kusumaningrum, Y. G. I., Manafe, H. A., Bibiana, R. P., Manajemen, M., Katolik, U., & Kupang, W. M. (2024). *Analisis Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022*.
- Lintang Prabowo, & M Tenku Rafli. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20-28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>
- Nasution, N. I., Rokan, M. K., & Lubis, W. A. (2023). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini Audit Bpk atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2019-2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 No. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.12076>
- Priyatno, D. (2020). *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Berganda Dengan SPSS & Analisis Regresi Data Panel Dengan EvIEWS* (A. Prabawati, Ed.). CV. Andi Offset.
- Suwanda, D., Elsy, R., & Meiyenti, I. (2020). *Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Y. P. Santoso, Ed.). PT. Remaja Rosdakarya.